

Belajar dari Aktivis Perempuan Muda: Sebuah Cara Memengaruhi Kesadaran Politis Sejak Dini

Learning from Young Women Activists: A Way to Influence Early Political Awareness

Ikhaputri Widiyanti¹ & Retno Daru Dewi G. S. Putri²

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia¹ & Jurnal Perempuan²
Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424¹ & Jalan T. B. Simatupang
kavling 23–24, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430²

ikhaputri.w@gmail.com¹ & daru@jurnalperempuan.com²

Kronologi Naskah: diterima 21 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

Abstract

This research emphasizes the importance of involving young women in various activism. Problems arise when young women are often considered immature to be involved in social and political movements. Apart from being supported by a patriarchal mindset that tends to subordinate women's experience, there is an intersectional problem where young people need more knowledge to make changes. In fact, one way to encourage active representation of women in political space is to encourage involvement from a young age. This research explores the activism experiences of young women who influence their respective communities. Data was collected through Focus Group Discussion (FGD) and strengthened through literature studies. The data is managed using a political participation theory approach, as well as the influence of affect theory in digital activism. The findings in this research show that young women's knowledge is just as essential in the political space. Their advocacy is full of the spirit of the times, so they can have a strong influence on other young women through the community they have built.

Keywords: youth community advocacy and networking, young women activists, young women's political participation

Abstrak

Penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan perempuan muda dalam berbagai aktivisme. Persoalan muncul ketika perempuan muda sering kali dianggap belum dewasa untuk terlibat dalam gerakan sosial dan politik. Selain didukung dengan pola pikir patriarkal yang cenderung menomorduakan pengalaman perempuan, ada persoalan interseksional yang menganggap bahwa anak muda tidak mempunyai cukup pengetahuan dalam melakukan perubahan. Padahal salah satu cara untuk mendorong representasi aktif perempuan di ruang politik adalah dengan mendorong keterlibatan sejak muda. Penelitian ini menggali berbagai pengalaman aktivisme perempuan muda yang memiliki pengaruh di komunitas mereka masing-masing. Data dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion (FGD)*, serta diperkuat melalui studi literatur. Data tersebut dikelola dengan pendekatan teori partisipasi politik serta pengaruh teori afek dalam aktivisme digital. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perempuan muda sama pentingnya dalam ruang politik. Advokasi yang mereka lakukan penuh dengan semangat pada zamannya sehingga dapat memberi pengaruh kuat bagi perempuan muda lain lewat komunitas yang mereka bangun.

Kata kunci: advokasi dan jejaring komunitas pemuda, aktivis perempuan muda, partisipasi politik perempuan muda

Latar Belakang

Saat ini, Indonesia memasuki persiapan pesta politik tahun 2024. Dari banyaknya kampanye dan sosialisasi para calon legislatif, lebih banyak didominasi laki-laki. Representasi perempuan masih minim. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU tersebut menentukan jumlah minimal partisipasi perempuan sebanyak 30 persen. Peraturan tersebut mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG). Jumlah yang serupa,

30 persen partisipasi perempuan, juga tertera pada Inpres tersebut. UU Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu adalah aturan lain yang turut menggarisbawahi partisipasi perempuan sebanyak minimal 30 persen pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) daftar calon tiap partai politik (Mulyono 2010). Selain itu, dalam AD/ART 10 partai politik peserta pemilu 2014, terdapat narasi mengenai partisipasi perempuan dalam partai (Pratiwi 2019). Upaya untuk memenuhi syarat 30 persen dilakukan melalui pengadaan organisasi sayap perempuan oleh partai politik.

Kebijakan afirmatif dalam berbagai peraturan menjadi sifat inklusif yang berpotensi membantu

tercapainya tujuan meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam kegiatan politik (Fitsum 2017). Hal ini terbukti dengan pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang berhasil disepakati pada 9 Mei 2022 yang lalu. Keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan berhasil mendukung sahnyanya UU yang sudah diperjuangkan selama kurang lebih 10 tahun tersebut. Pengalaman kolektif perempuan yang masih mendominasi angka korban kekerasan seksual (KS) juga menjadi pemicu pengesahan UU TPKS.

Ternyata masih banyak yang menyalahgunakan kebijakan afirmatif ini. Sering kali perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi di ruang politik hanya untuk memenuhi syarat kuota 30 persen. Namun dalam pengambilan keputusan, opini perempuan belum tentu didengar apalagi dipertimbangkan. Hal ini menjustifikasi bahwa selama ini perempuan hanya dijadikan pelengkap dan kepentingannya tidak dijadikan agenda politik yang utama (Margret 2019).

Hal utama yang menghambat partisipasi perempuan di ruang politik adalah nilai patriarki yang bekerja di masyarakat. Ada peminggiran perempuan di ruang privat yang menyulitkan perempuan masuk ke ranah politik di ruang publik. Pun berada di ruang publik, terjadi feminisasi pekerjaan perempuan sehingga mengalienasi perempuan dari kerja-kerja yang didominasi oleh laki-laki (Izzati 2019).

Pengecilan peran perempuan di ruang politik diperburuk oleh konstruksi dan persebaran media yang seksis. Pelabelan seksis oleh media yang berfokus pada penampilan ketubuhan seperti 'politisi cantik' sering kali menjauhkan perempuan dari citra baik prestasi yang telah dihasilkannya selama ini (VOA Indonesia 2019). Untuk membuktikan bahwa perempuan memiliki kemampuan yang serupa dengan laki-laki di ruang politik, dibutuhkan kesempatan dan ruang bagi perempuan untuk terlibat secara substantif dan opininya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Berbagai upaya advokasi dilakukan untuk mengatasi diskriminasi yang dialami oleh perempuan di ruang politik. Berkat upaya ini, kita dapat melihat adanya peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam ruang politik. Salah satunya juga menasar pada keterlibatan perempuan muda. Percepatan teknologi informasi pada generasi sekarang telah membuktikan adanya peran positif dalam mendorong perempuan-perempuan muda sadar atas pentingnya terlibat

dalam kegiatan politik praktis di ruang publik. Kita perlu memperhatikan beberapa catatan: 1) adanya stereotipe gender yang mengakar baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan sekitar tiap perempuan; 2) perbedaan perlakuan akibat stereotipe tersebut membuat lebih banyak laki-laki yang memiliki akses sejak dini untuk berlatih baik dalam kegiatan sosial maupun politik; 3) minimnya dukungan terhadap perempuan muda yang memutuskan untuk berkarier politik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi perempuan muda untuk meningkatkan kemajuan keterlibatan perempuan di ruang politik.

Tema mengenai pentingnya mendorong keterlibatan perempuan muda dalam ruang politik pun diangkat oleh Plan International di tahun 2022. Dalam *Equal Power Now, Girls, Young Women & Political Participation* (2022), terpapar hasil penelitian dari berbagai negara terkait apa saja yang dipahami mengenai partisipasi dan bagaimana pengaruh serta strategi yang dilakukan perempuan muda dalam ruang politik. Adanya keberagaman isu dan juga bagaimana penggunaan teknologi baru semakin mendorong perempuan-perempuan muda mengeksplorasi berbagai isu sosial dan politik. Kami menggali lebih jauh temuan-temuan ini, selain dari berbagai literatur pendukung lain, untuk menjadikan cerita para aktivis perempuan muda sebagai serialitas pengetahuan. Kesadaran para aktivis perempuan muda ini mampu memberikan pengaruh kuat bagi perubahan yang berkeadilan di komunitas dan lingkungan sekitar mereka.

Kami memulai penelitian ini dengan pertanyaan utama terkait pentingnya belajar dari pengalaman dan keterlibatan perempuan muda dalam ruang politik—terutama terkait cara mereka menggunakan pemahaman feminis yang kuat dalam mengadvokasi isu sosial dan politik. Definisi dari ruang politik ini sendiri datang dari pemahaman bahwa berbagai peristiwa di ruang publik yang menjadi pertemuan fenomena sosial (Kuljiš 2017). Umumnya akan ada upaya memisahkan ruang publik dengan privat. Tetapi ketika kita bicara pengaturan dalam ruang privat, maka ada ketidakjelasan dalam distingsi definitifnya. Pada akhirnya, kegiatan di ruang privat pun menjadi politis karena melibatkan bagaimana reproduksi kehidupan dianggap berada dalam satu pengaturan (Kuljiš 2017). Ada keterkaitan politis dalam relasi ruang publik dan privat. Hal yang menarik pada pemahaman ini, bagi Nancy Fraser (1947—), pemahaman ruang politik tidak sekadar bicara mengenai negara sehingga

perbincangan mengenai pengalaman di luar institusi publik—dalam hal ini termasuk pengalaman di ruang privat—dapat menyeimbangkan relasi yang terbentuk dalam ruang publik (1990). Ketika kita sampai pada kesepakatan definisi ini, maka pengalaman perempuan muda menjadi salah satu variabel penting yang perlu untuk didengarkan.

Kami membuktikan bahwa isu keterlibatan perempuan dalam ruang politik bukan sekadar sebagai alat atas tujuan lain. Sering kali perbincangan mengenai 'pentingnya representasi perempuan' akan terkait dengan kebutuhan untuk mengangkat isu-isu spesifik. Kami mengakui bahwa memang keterlibatan dan mendengarkan pengalaman perempuan sebagai subjek pertama adalah hal yang penting. Tetapi dalam kerangka ini, sering kali kita kemudian melupakan substansi dari pentingnya mendorong keterlibatan dan representasi perempuan sebagai isu yang berdiri sendiri. Berdasarkan logika berpikir ini, kami sepakat dengan apa yang diangkat oleh Iris Marion Young (1949—2006) mengenai serialitas gender (1994). Ketika kita melakukan universalisasi pemahaman bahwa semua pengalaman perempuan sama—sebagai satu kelompok—maka kita menghilangkan rekognisi atas keberagaman pengalaman tiap individu perempuan yang ada di dalamnya. Koleksi pengalaman perempuan ini akan memunculkan kesepahaman dalam bentuk dukungan atas tiap pengalaman (yang berbeda). Setiap isu dalam ragam pengalaman tersebut akan berinterseksi dengan isu lain.

Rumusan inilah yang kami jadikan pegangan dalam proses penelitian. Upaya pengumpulan dan dokumentasi pengalaman perempuan muda dalam ruang politik menjadi cara kami meneruskan cerita mereka. Lebih lanjut lagi, ada hal penting pada pendekatan para perempuan muda dalam upaya advokasinya. Aktivisme digital dan penggunaan bahasa sehari-hari yang lebih dihidupi oleh mereka membuat isu yang mereka angkat mudah dipahami. Inilah pembelajaran yang tampak dari hasil penelitian kami. Ada dampak positif dari partisipasi mereka di dalam ruang politik. Perempuan muda yang terlibat di dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat menjembatani jarak di antara peraturan dan penerapan kebijakan, membangun potensi perempuan dan kaum muda dalam kegiatan politik, memperkuat pemberdayaan perempuan dan kaum muda, mengurangi kemiskinan, membangun inisiatif partisipasi perempuan dan kaum muda melalui berbagai media, menjembatani berbagai kelompok dan

komunitas yang berbeda, dan mempertajam agenda isu perempuan, kedamaian, dan keamanan (Mindzie 2015).

Metode Penelitian dan Kerangka Teori

Kami membangun kerangka pemikiran atas partisipasi politik melalui rangkaian teori politik Iris Marion Young. Dia memulai dengan mengkritik dominasi yang bekerja di masyarakat sebagai penghambat munculnya inklusivitas demokrasi (Young 1990). Perlakuan sama pada setiap orang akan memunculkan manipulasi norma universalis yang memaksakan peleburan setiap keunikan pengalaman masing-masing individu. Pada posisi ini, Young menawarkan konsep politik perbedaan yang memperjuangkan kesetaraan di antara kelompok yang berbeda-beda latar identitasnya. Inklusivitas ini pun akan membawa kita pada tawaran solidaritas di dalam politik perbedaan (Young 2000).

Konsep inklusif ini menggarisbawahi adanya pesan kesetaraan dalam perbedaan. Young tidak bertujuan untuk menghapuskan perbedaan karena baginya justru yang perlu kita kembangkan adalah sikap mengakui dan menghargai. Sikap ini akan memunculkan dialog yang inklusif dalam demokrasi (Young 2000). Perbedaan tidak dilihat sebagai fungsi atributif, melainkan sebagai jembatan hubungan antar kelompok serta interaksi kelompok dengan institusi (negara) (Young 1990). Tujuan dari politik perbedaan adalah untuk merumuskan kembali makna perbedaan dan relasi intersubjektif serta institusional. Politik perbedaan dari Young menawarkan sebuah relasi dengan semangat solidaritas. Dukungan dalam solidaritas ini mengaitkan persoalan perbedaan dengan keadilan. Konsep Young mengenai perbedaan ini justru mengandaikan keterbukaan kemungkinan munculnya atribut tiap individu dan kelompok. Namun, sifat atributif ini tidak dilihat sekadar sebagai deskripsi material semata, melainkan memiliki fungsi yang menghubungkan individu, kelompok, dan institusi negara (Young 1990).

Sifat keterhubungan ini pula yang kemudian dikuatkan oleh Young dalam pemahaman serialitas gender (1994). Pemahaman serialitas ini dia bedakan dengan apa yang disebut oleh Jean-Paul Sartre (1905—1980) sebagai kelompok—dalam karyanya di tahun 1960 yang berjudul *Critique de la raison dialectique (Critique of Dialectical Reason)*. Young menolak pemahaman kelompok yang diajukan oleh Sartre (1994). Bagi Sartre (dikutip dari Young 1994), kelompok adalah sekumpulan individu yang secara sadar mengakui keberadaan mereka dalam satu

hubungan untuk menjalankan proyek bersama. Ada pengakuan atas tujuan bersama di dalam kelompok. Sementara bagi Young, serialitas memiliki arti berbeda dengan kelompok karena menggambarkan tingkat keberadaan sosial—kondisi yang datang karena adanya pembatasan dan pengarahannya keadaannya serta kondisi material yang membentuknya (Young 1994). Kumpulan individu dalam serialitas ini disatukan secara pasif oleh objek, rutinitas, dan kebiasaan—sebagai orientasi tindakan yang dilakukan bersama. Dalam persoalan gender, kesamaan sebagai perempuan membuat kita berpikir bahwa kita adalah satu kelompok yang sama. Padahal, bagi Young, ‘kesamaan’ yang hadir dalam rasa sebagai perempuan ini muncul karena adanya serialitas yang membuat kita memahami satu tindakan bersama. Ini dapat dicontohkan dengan memahami stereotipe yang kemudian mendeterminasi pemikiran dan perilaku sebagai perempuan. Padahal tiap individu dapat mempertimbangkan perilakunya sendiri tanpa terikat pada satu tujuan yang sama. Serialitas ini pula yang memberi ruang pengakuan bagi individu untuk melihat pengalaman dengan isu interseksional.

Kami kemudian menarik pemahaman solidaritas yang ditawarkan oleh Young. Dasar dari solidaritas saling memahami adanya keterkaitan hidup antar individu (Young 2000). Perbedaan budaya dan struktur sosial yang bekerja di dalam masyarakat justru menantang batas-batas konseptual dan spasial antar individu, kelompok, dan institusi. Pada akhirnya, setiap perbedaan serialitas tersebut akan memunculkan sebuah cara ekspresi komunikatif dalam upaya timbal balik dan saling mengenal tiap identitas (Young 2000). Konflik yang sering kali digaungkan sebagai akibat perbedaan budaya pada dasarnya muncul karena alasan politis yang terkait dengan dominasi kuasa. Interaksi perbedaan budaya ini perlu dipahami sebagai kerangka yang justru mengatasi perbedaan itu sendiri—sekali lagi perlu ditekankan bahwa upaya ini bukan untuk menjadikan tiap individu atau kelompok sama, melainkan sebagai jembatan interaksi perbedaan. Young menawarkan sebuah konsep perbedaan struktural yang dibentuk atas dasar gender, ras, kelas, seksualitas, dan sebagainya—perbedaan terkait aspek fisik, psikologis, dan status sosial (2000). Perbedaan struktural inilah yang akan mengatasi persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Upaya memahami perbedaan struktural menjadi cara kita melihat serialitas dalam kelompok sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan atas identitas individu atau kelompok.

Alur pemikiran yang kami bangun dalam penelitian ini kemudian kami kelola dengan tahapan awal yakni pengumpulan data dan observasi. Data dan informasi pada penelitian ini digali secara mendalam melalui *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan 10 orang peserta. Narasumber kami berasal dari komunitas di bawah asuhan Plan International Indonesia dengan rentang usia 18–25 tahun. FGD sendiri merupakan salah satu bentuk metode wawancara kualitatif yang menggunakan diskusi kelompok yang dipandu oleh peneliti dalam tujuan mengumpulkan data (Given 2008). Metode ini membantu proses penelitian kami untuk mengelola data yang datang dari suara para kelompok muda yang memiliki kegiatan aktivisme sosial dan politik. Seluruh narasumber merupakan perempuan perwakilan dari berbagai komunitas yang menyuarakan kepentingan perempuan serta kaum marginal dan rentan kepada pemegang kekuasaan di lingkungan advokasi mereka. FGD tersebut dilakukan pada bulan Juni 2023. Untuk melindungi privasi dan menciptakan ruang aman, nama kesepuluh narasumber akan disamarkan—berdasarkan kesepakatan yang kami dapatkan selama proses FGD.

Pemilihan narasumber perempuan bertujuan untuk melihat implementasi dari politik perbedaan yang selama ini telah mengalienasi mereka dari laki-laki di dalam kelompok atau komunitas masing-masing. Penelitian ini melihat seberapa jauh keterlibatan para narasumber di dalam pengambilan keputusan atau memengaruhi penyusunan kebijakan dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka suarakan. Selain itu, kami memiliki tujuan untuk menjabarkan perbedaan perlakuan yang diterima oleh para narasumber di dalam menyuarakan kepentingan mereka. Keberhasilan para narasumber dalam mengadvokasi kelompok yang diwakilinya juga dijabarkan dalam penelitian ini untuk melihat prestasi dan kerja-kerja baik yang sudah diraih selama ini.

Pencatatan data dari penceritaan pengalaman perempuan-perempuan muda ini menekankan pada pengalaman unik kebertubuhan dan keseharian mereka sebagai subjek. Pengalaman tiap narasumber menjadi pengetahuan berharga yang dapat dikelola secara metodis menggunakan pendekatan analisis feminis atas representasi politik perempuan. Beberapa data riset terdahulu dan kepustakaan juga digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan kami pilah berdasarkan tujuan yang dibangun dalam penelitian ini hingga tercapai analisis, konklusi, serta rekomendasi yang menguatkan kepentingan atas

keterlibatan perempuan dalam ranah politik sejak muda. Perpaduan teori dan metode dalam penelitian ini juga menunjukkan upaya kami mengartikulasikan dan merefleksikan keterlibatan perempuan muda di ruang politik di Indonesia berdasarkan pengalaman para narasumber yang mewakili komunitas-komunitas yang menyuarakan kepentingan perempuan serta kaum marginal dan rentan lainnya.

Cerita Aktivistis Perempuan Muda

Pada tahap pertama, kami melakukan pengelompokan cerita tiap narasumber terkait motivasi dan hambatan yang dialami selama mereka melakukan proses aktivisme sosial dan politik. Cerita para aktivis perempuan muda ini adalah cara kami menggarisbawahi persoalan ontologis yang hadir sebagai sebuah serialitas kategori pengalaman. Cara pikir ini akan membantu kita keluar dari keterjebakan pemahaman yang mengategorikan perempuan sebagai satu kelompok (Young 1994). Upaya mencari kesamaan karakteristik akan menormalkan operasi, berlaku sama untuk setiap perempuan. Padahal dalam kenyataannya, akan ada banyak variabel lain yang membedakan tiap pengalaman perempuan.

Upaya politis ini memberi ruang atas kemungkinan memikirkan perempuan sebagai rangkaian pengalaman. Tiap pengalaman individu akan memberi banyak cerita yang dapat kita jadikan pengetahuan. Kolektivitas pengalaman perempuan muda dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat tiap perempuan sebagai individu yang unik sehingga tiap pembelajaran yang kita dapatkan tidak dapat dijadikan sebuah kesimpulan yang memukul rata solusi untuk tiap persoalan. Kolektivitas pengalaman perempuan muda ini menjadi tantangan atas konsep yang sering kali menyamaratakan pengalaman mereka. Dalam tiap penceritaan terbukti, ternyata ada banyak faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi mereka dalam setiap aktivismenya.

Muncul banyak perbedaan latar yang menjadi faktor alasan mereka memulai aktivisme. Pun ada kedekatan isu, latar belakang tiap narasumber tentunya akan memengaruhi pula bagaimana mereka mempersepsi tiap persoalan, termasuk cara mereka menanggapi hambatan yang ditemukan. Dari temuan kami, terlihat bahwa tiap narasumber tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keluarga dan lingkungan. Justru pengaruh dari keseharian mereka yang menjadi alasan kuat atas aktivisme yang mereka lakukan. Alasan ini

juga yang mendasari ketertarikan isu tiap narasumber. Dalam penelusuran awal ini, kami memaparkan terlebih dahulu latar belakang motivasi serta hambatan yang dialami oleh para aktivis perempuan muda yang menjadi narasumber kami.

Motivasi Penggerak Para Aktivistis

Upaya memenuhi syarat keterlibatan perempuan di ruang politik sebesar 30 persen tidak selalu bebas hambatan. Aktivitas politik juga dapat kita pahami sebagai bentuk advokasi di ruang publik atas berbagai isu sosial. Semangat dalam mengangkat isu umumnya akan dimulai dari ketertarikan pada isu, baik karena pengalaman pribadi yang lekat dengan isu yang diangkat atau bisa juga karena justru dihadapkan pada pengalaman individu lain yang menjadi korban atas ketidakadilan. Pada bagian ini, kami akan membagikan latar belakang dan motivasi para aktivis perempuan dalam mengadvokasikan isu-isu yang mereka perjuangkan di ruang politik.

Dalam FGD, sepuluh perempuan muda yang aktif di ruang politik berkumpul dengan kami di ruang virtual *Zoom Meeting*. Berdasarkan data yang kami dapatkan, dari sepuluh, satu orang narasumber sudah mendapatkan gelar sarjana dan satu orang lainnya baru akan memulai perkuliahannya. Delapan lainnya masih berkuliah dan menunjukkan adanya keinginan dan kesempatan bagi mereka sebagai perempuan muda untuk mengemban pendidikan tinggi. Selain adanya kesempatan belajar lewat pendidikan tinggi, aktivisme para narasumber juga dimotivasi oleh pengalaman pribadi mereka.

Ada kemiripan pengalaman yang dialami oleh Narasumber 1, 4, 6, dan 9. Keempat perempuan muda memulai aktivisme mereka karena dipicu oleh perkawinan usia anak yang terjadi di sekitar mereka. Tidak hanya anak-anak di lingkungan tempat tinggal, Narasumber 9 bahkan menyaksikan sendiri sepupunya menjadi korban perkawinan usia anak. Para narasumber paham bahwa dengan paksaan perkawinan tersebut, maka anak-anak, utamanya anak perempuan, yang mereka lihat atau kenali mengalami putus sekolah. Berbeda dengan keempat narasumber tersebut, Narasumber 2 mengalami sendiri paksaan keluarga untuk menikah dengan mantan suaminya. Walaupun sudah bercerai dan memotivasinya untuk mengadvokasi para korban kekerasan berbasis gender tersebut, Narasumber 2 masih berproses dalam melepaskan diri dari dampak traumanya.

Narasumber 5 dan 8 termotivasi oleh kekerasan seksual (KS) yang mereka alami. Narasumber 5 mengalami KS dan juga menyaksikan ibunya menjadi korban kawin paksa. Sementara itu, narasumber 8 mengalami KS di lingkungan sekolah yang disertai diskriminasi terhadap murid-murid perempuan. Pengalaman tidak menyenangkan tersebut membuat mereka menyuarkan tuntutan melalui advokasi yang dimulai dari usia remaja. Tidak hanya KS, isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) juga menjadi motivasi salah satu narasumber. Narasumber 3 memulai advokasinya setelah ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan bantuan medis untuk kesehatan reproduksinya karena tidak berani berbicara. Sikap bungkam tersebut diakibatkan oleh tabunya isu HKSR untuk dibicarakan meskipun tujuannya adalah mencari pertolongan.

Pengalaman menyaksikan diskriminasi juga dialami oleh Narasumber 10 yang memiliki ibu seorang pejabat publik. Awalnya sang ibu tidak diberikan kesempatan untuk menjadi kepala desa (Kades) oleh pemerintah setempat. Hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap tidak akan mampu menjadi pemimpin karena beban pekerjaan domestik rumah tangga.

Hal yang menarik adalah ketika kami menanyakan motivasi dari Narasumber 7. Ia berangkat dari pengalaman yang berbeda karena termotivasi oleh hasil tugas wawancaranya ketika Sekolah Menengah Atas (SMA). Dari tugas tersebut, ia melihat banyaknya kaum muda di ruang politik, utamanya perempuan, mengalami diskriminasi dalam menyuarkan kepentingan dan aspirasi mereka. Kemudian Narasumber 7 bergabung di komunitas kaum muda setempat hingga menyuarkan hak-hak perempuan dalam advokasinya.

Kolektivitas cerita para narasumber atas motivasi yang melandasi aktivisme mereka menunjukkan bahwa alasan partisipasi dalam kegiatan sosial dan politik tidak selalu sama. Baik sama secara isu atau posisi sebagai korban (langsung) ketidakadilan. Terlihat dari motivasi Narasumber 10 dan 7 yang berangkat dari pengalaman di luar diri mereka. Motivasi melibatkan diri dalam tindak aktivisme sosial dan politik justru muncul dari diskriminasi atas pengalaman ketertindasan—baik ketika mengalami langsung maupun melihat ketidakadilan yang terjadi di depan mata.

Keberagaman Isu dan Hambatan yang Menyertai

Pada bagian ini, kami mulai melakukan kategori isu dan hambatan yang dihadapi oleh para narasumber.

Isu dan hambatan dalam penceritaan para narasumber kembali kami jadikan sebuah serialitas persoalan yang secara kolektif menguatkan peran mereka melakukan advokasi sosial dan politik. Konteks dalam kehadiran serialitas isu dan hambatan menjadi bentuk nyata atas alasan kenapa kami berangkat dari argumen bahwa isu representasi perempuan dalam ruang politik diperlukan. Kehadiran mereka justru menjadikan isu-isu spesifik yang diangkat dapat kita kenali—sekaligus hambatan yang dialami dapat menjadi bagian dari serialitas pengetahuan untuk kita jadikan pembelajaran. Para narasumber mengadvokasikan isu-isu mereka melalui lima afiliasi yang berbeda. Kelimanya adalah BeWithYou, Youth Coalition for Girls, State Youth Sukabumi, Ceria Indonesia, dan Sexdugram.

BeWithYou (BWY) merupakan ruang politik lima orang narasumber. Kelimanya bergerak di BWY pada lima regional yang berbeda. Didirikan dengan tujuan utama mempromosikan *body positivity*, Narasumber 5 mendirikan BWY untuk mempromosikan hak anak dan kelompok penyandang disabilitas. Isu kekerasan seksual (KS) turut menjadi advokasinya bersama BWY Indonesia yang juga memiliki tantangan terbesar. Di dalam aktivismenya melawan KS, stigma masyarakat masih menjadi halangan bagi Narasumber 5. Korban masih sering disalahkan dan kasus berujung pada pencabutan laporan karena tekanan sosial yang mereka alami.

Beberapa kali kita ada yang sudah sampai jalur hukum juga, cuma sampai saat ini belum ada yang berhasil untuk sampai ke tahap yang benar-benar sampai ke pengadilan *gitu*, karena biasanya teman-teman yang melapor itu langsung kayak menarik dirinya dan akhirnya, “Aduh kayaknya gak bisa deh. Aduh kayaknya gak sanggup deh. Aduh kayaknya aku gak bisa lanjutin,” nah ini mungkin jadi *note* juga untuk aku personal, kita yang jadi *outsider* tuh gampang banget ya, kayak, “Harus lapor, harus menuntut keadilan.” Tapi bagi orang yang merasakan itu, pasti susah untuk berada di tahap itu, *gitu*. Jadi, kalau ada yang melapor, terus mundur, ya kita tidak bisa paksa, kita cuma bisa mendampingi dan *ngasih awareness* aja kalau misalnya sampai ke pengadilan pun kita akan bantu, *gitu* (Narasumber 5 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Hambatan juga dialami oleh Narasumber 6 dari BWY Sumatra. Perjuangannya dan aktivis lain di BWY sering kali diserang oleh pelaku pelecehan verbal yang didominasi oleh laki-laki. Hal tersebut dialaminya karena Narasumber 6 menyuarkan pentingnya peranan laki-laki dalam menyuarkan anti kekerasan seksual. Narasumber 8 dari BWY Bandung tidak hanya mengalami hambatan yang datang dari luar, namun juga dari keluarganya sendiri. Berasal dari keluarga yang religius, orang-orang terdekatnya masih sulit

menerima bahwa Narasumber 8 adalah seorang feminis yang dipahami sebagai penindas laki-laki. Ageisme juga pernah terjadi ketika aktivismenya tidak dilirik karena usianya yang masih muda sehingga Narasumber 8 dianggap tidak mampu mengambil keputusan. Sering kali acara yang diselenggarakannya pun hanya diteruskan ke perempuan saja karena audiens laki-laki dianggap tidak akan berminat menghadiri.

Narasumber 2 dan 7 mengalami hambatan yang sedikit berbeda. Secara teknis, Narasumber 2 mengalami masalah di peminatan sukarelawan. Ia sering kali menemukan sukarelawan yang bersemangat di awal saja dan hanya tertarik dengan sertifikat penghargaan partisipasi saja. Hanya 5 hingga 10 persen sukarelawan yang dapat membantu jalannya program BWY yang diselenggarakannya. Narasumber 7 mengalami hambatan yang serupa yaitu sukarelawan yang sulit untuk dipastikan partisipasinya. Hal tersebut terjadi karena beberapa pendaftar tertarik karena mengagumi pendiri BWY sehingga terjadi bias ketika proses wawancara dilakukan.

Di afiliasi yang berbeda, State Youth Sukabumi, Narasumber 1 juga sempat mengalami ageisme. Memulai aktivismenya di Forum Anak Kabupaten Bogor, sebagai aktivis perempuan berusia muda, pemerintah daerah setempat sering kali tidak memberikan ruang baginya dan aktivis lain di dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Afiliasi lain yang menjadi pusat aktivisme lebih dari satu orang narasumber adalah Youth Coalition for Girls (YCG). Menjadi wadah advokasi isu-isu yang menjadi fokus Narasumber 4 dan 9, YCG berfokus pada hak-hak anak, seperti pendidikan dan ruang terbuka yang ramah anak. Berada di lokasi yang berbeda membuat kedua narasumber menghadapi hambatan yang tidak serupa. Narasumber 4, dengan aktivisme di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), sempat menghadapi *phising*, melalui grup *chat* sehingga ancaman penyebaran informasi-informasi sensitif yang berhubungan dengan advokasinya sering kali menghambat aktivisme yang dilakukan.

Narasumber 9, dengan aktivisme di Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus berhadapan dengan masyarakat yang masih kental pola pikir patriarkinya. Mengedukasi masyarakat setempat untuk memberikan kesempatan perempuan bersekolah sangat sulit. Menurutnya, jalur agama yang juga masih kental patriarkinya adalah cara yang tepat jika ingin mendekati dan mendekonstruksi pemikiran masyarakat.

Dua narasumber berikutnya, ke-10 dan 3, berafiliasi di Ceria Indonesia dan Sexdugram. Keduanya harus menghadapi stereotipe dan stigma masyarakat dalam aktivismenya. Narasumber 10 harus menyaksikan diskriminasi yang dialami oleh ibunya ketika mengajukan diri sebagai kepala desa. Hal tersebut terjadi karena menurut pemerintah dan masyarakat setempat, perempuan tidak mampu menjadi pemimpin. Mereka khawatir perempuan akan terdistraksi oleh pekerjaan domestik rumah tangga. Melalui Ceria Indonesia, tidak hanya keterlibatan perempuan di ruang politik, pendidikan untuk perempuan juga menjadi isu yang diadvokasikannya. Sementara itu, Narasumber 3 mengalami diskriminasi akibat topik edukasi seksual yang diadvokasikannya melalui media sosial. Sering kali ia mendapatkan nasihat bahwa isu tersebut tidak pantas untuk disuarakan oleh perempuan muda, terutama yang berpenampilan religius, seperti Narasumber 3. Namun, hambatan tersebut tidak membuatnya berhenti mengedukasi masyarakat luas mengenai HKSR melalui akun media sosial Sexdugram.

Dari pengalaman kesepuluh narasumber, hambatan didominasi oleh penilaian seksis masyarakat yang kemudian mempersulit keterlibatan mereka di ruang politik. Akan tetapi, para aktivis tidak kemudian menyerah. Hambatan tersebut justru dijadikan dasar yang memperkuat perjuangan mereka dalam mengadvokasi isu-isu yang dianggap penting untuk memberdayakan perempuan. Perbedaan pengalaman narasumber menunjukkan apa yang diangkat oleh Young (1990) mengenai pentingnya memahami politik perbedaan. Upaya para narasumber untuk mengangkat persoalan ketidakadilan lewat advokasi tiap minat isu mereka menunjukkan bahwa adanya upaya pengakuan atas perbedaan pengalaman—termasuk bagaimana pengalaman tersebut memunculkan ketidaksetaraan. Ragam solusi yang dilakukan oleh tiap narasumber merupakan bentuk penghargaan atas perbedaan situasi—sebagai serialitas identitas. Berangkat dari isu-isu yang diangkat, kita dapat memastikan bahwa relasi antara 'partisipasi perempuan di ruang politik dengan isu perempuan' tidak selalu harus terjadi.

Pada cerita Narasumber 1, isu yang diangkat lebih banyak terkait isu keterlibatan anak muda dengan persoalan lingkungan. Walau mayoritas narasumber lain memiliki relasi isu dan perempuan, tetapi kita tidak dapat memukul rata bahwa partisipasi perempuan di ruang politik selalu terkait dengan isu perempuan. Jika kita membiarkan penalaran ini bekerja, maka akan ada

lompatan asumsi bahwa aktivis perempuan identik dengan isu perempuan secara spesifik. Padahal dalam tawaran payung politik feminis, justru kita harus bisa melihat bahwa relasi tiap isu datang dari serialitas latar pengalaman dan pengetahuan.

Kebaruan, Pengaruh, dan Solidaritas Aktivis Perempuan Muda

Kami menemukan hal yang menarik dari pengalaman advokasi para narasumber—sebagai anak muda. Mereka banyak memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui penggunaan internet. Aktivisme digital atau yang dikenal juga dengan *cyberactivism* merupakan bentuk aktivisme menggunakan internet dan media digital sebagai platform mobilisasi massa secara politis (Fuentes 2023). Kegiatan aktivisme ini memanfaatkan jaringan digital untuk bereaksi terhadap isu sosial dan politik.

Internet digunakan sebagai media distribusi informasi yang dapat menjangkau banyak orang—tanpa batasan jarak dan waktu. Penggunaan aktivisme digital merupakan salah satu bentuk perebutan ruang digital untuk mengadvokasi berbagai isu ketidaksetaraan dan ketidakadilan (Salsabila & Diera 2022). Masuknya advokasi isu sosial dan politik, terutama isu perempuan menunjukkan bahwa ruang digital memberi akses mudah atas persebaran isu. Kita tidak perlu lagi hanya mengandalkan mobilisasi massa di jalan. Aktivitas *online* bahkan dapat merangkul lebih banyak kelompok untuk mengetahui persoalan di tingkat akar rumput. Kesadaran isu menjadi lebih mudah ditularkan melalui gerakan politik daring ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa cara kerja ruang digital ibarat dua sisi mata uang. Pada satu sisi penggunaan media digital dapat membantu kerja advokasi dan di sisi lain dapat menjadi reaksi balik secara negatif—menyerang isu bahkan pribadi para aktivis perempuan muda. Namun, kita perlu mengakui bahwa perebutan ruang digital dapat menyebarkan lebih luas dan cepat isu-isu gender serta sudut pandang feminis (Salsabila & Diera 2022).

Upaya perebutan ruang digital ini pun dilakukan oleh para narasumber kami. Walau dengan berbagai hambatan yang dialami—sebagai bentuk bola liar reaksi pengguna lain dalam ruang digital—namun ada hal yang perlu kita apresiasi: kebaruan metode advokasi yang kreatif dan lebih dekat dengan semangat zaman saat ini.

Kebaruan metode advokasi ini membantu para aktivis perempuan muda memunculkan empati secara kreatif kepada individu dan kelompok lain. Dalam teori afek, kita bergerak melampaui satu emosi tunggal dalam rangka memahami kemampuan kita dalam memengaruhi atau dipengaruhi lebih dalam oleh orang lain atau isu tertentu (Åhäll 2018). Afek berbeda dengan pengalaman emosional pribadi—atau disebut sebagai perasaan. Perasaan kita rasakan dan pahami dalam wilayah kesadaran, sementara afek berada dalam kondisi di luar kesadaran. Sara Ahmed (1969—) melihat bahwa teori afek akan menguatkan cara kita bertindak di ruang politik—bahwa emosi yang kita rasakan pun bersifat politis (2004).

Ada resonansi yang menjalinkan komunikasi emosional antara tubuh dan pikiran yang memengaruhi kita. Afek menjadi penguat metode dalam advokasi para aktivis perempuan muda. Metode yang ditawarkan dalam afek ini mengangkat pengetahuan feminis untuk mengidentifikasi apa yang politis dalam kerja dunia (Åhäll 2018)—termasuk dunia digital. Selain itu, kerja afek akan membuka ruang baru untuk memikirkan perbedaan secara politis. Perbedaan pengalaman dan pengetahuan masuk sebagai pemahaman perasaan ketertindasan. Ada penceritaan dan upaya berbagi perasaan yang kemudian melibatkan reaksi tubuh kita—memunculkan emosi mendalam. Berbagi perasaan inilah yang kemudian membantu kita menumbuhkan upaya solidaritas.

Pada bagian ini, kami mengangkat kisah para narasumber terkait bagaimana mereka membangun jejaring dan menciptakan metode advokasi secara kreatif sehingga isu tidak lagi tampak jauh dari keseharian kita. Jejaring dan advokasi yang dilakukan oleh para narasumber ini pun telah berhasil memunculkan berbagai bentuk solidaritas sebagai dukungan atas perjuangan mereka di ruang politik.

Dua Sisi Penggunaan Media Sosial dalam Keterlibatan Aktivis Perempuan Muda di Ruang Politik

Menjadi aktivis di tengah kemajuan internet dan teknologi, penggunaan media sosial (medsos) adalah satu metode advokasi yang digunakan oleh kesepuluh narasumber. Cepatnya perputaran informasi menggunakan medsos sangat membantu mereka dalam menyampaikan opini dan mengedukasi publik dengan isu-isu yang mereka perjuangkan.

Kadang kita mendapatkan banyak informasi seperti perlombaan yang dapat kami contoh karena dengan adanya media sosial. Kita juga bisa memanfaatkan sehingga organisasi berjalan karena kita belajar untuk kreatif, untuk memanfaatkan media sosial yang kita miliki, dan kita pun juga ada karena kita sudah tahu seefektif itu di sosial media. Kita pun ada pelatihan di media sosial, kayak pelatihan konten kreatif (Narasumber 10 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Narasumber 4, misalnya, percaya bahwa medsos juga dapat membantu pemberdayaan perempuan seperti sesama aktivis perempuan. Beberapa narasumber bahkan hingga sekarang menjadikan platform digital—baik sebagai individu maupun menggunakan nama komunitas—sebagai media kampanye isu yang mereka angkat.

Pengaruh besar atas advokasi digital yang mereka lakukan berhasil memberikan alternatif bagi pengguna digital—terutama perempuan muda—untuk melihat keberhasilan dari gerakan yang mereka buat. Beberapa narasumber bahkan memiliki banyak pengikut di platform digital pribadi mereka dan membuat banyak dari pengikut mereka pun ikut terlibat dalam aktivisme sosial dan politik yang mereka angkat. Situasi afektif yang dibawa oleh para narasumber dalam aktivisme digital mereka berhasil menumbuhkan perasaan yang seakan-akan “sama” dirasakan oleh para pengikut platform digital yang mereka gunakan. Keberhasilan ini memengaruhi ruang politik mereka secara kontekstual (Ahmed 2004). Ada kesepakatan baru yang kita pahami sebagai persepsi bersama, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan.

Walau demikian, penggunaan medsos juga disertai oleh dampak-dampak negatif. Narasumber 1, karena memulai advokasinya di forum anak, sering kali khawatir akan dampak medsos terhadap aktivis yang masih di bawah usia legal. Ancaman-ancaman ini disebut oleh Narasumber 5 sebagai NCII atau *Non-Consensual Intimate Image*. Penyebaran NCII bisa dialami oleh siapa saja. Namun korban yang usianya masih belum sah di mata hukum lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender siber (KBGS) tersebut. Penggunaan media sosial juga membuat para aktivis rentan terhadap ujaran kebencian.

Aku selalu dikatakan kayak SJW, “Ih cewek tahu apa sih”, “Ih dasar cewek terlalu baperan, ih apa sih gak jelas banyak omong, cerewet!” gitu. Waktu itu ada isu KBGO (Kekerasan Berbasis Gender *Online* – Red.), dan aku ikut *speak up* soal itu, dan aku diteror. Aku secara personal juga mendapatkan teror, bahkan BeWithYou pun pernah dapat kayak *hate comment* juga karena kita mengangkat isu kesetaraan

gender, itu sering banget di sosial media (Narasumber 5 2023, FGD 23 & 28 Juni).

Komentar-komentar yang disertai dengan ujaran kebencian sering kali ditangani oleh para narasumber dengan memisahkan kegiatan medsos personal dan profesional mereka. Jika tidak, maka komentar yang bahkan terkadang berisikan pelecehan seksual secara verbal, seperti yang dialami oleh Narasumber 3, dapat membuat kondisi mental para aktivis terganggu. Narasumber 9 bahkan menerima komentar seksis dan misoginis berupa *body shaming* yang ditujukan untuknya dan aktivis-aktivis perempuan lain di organisasinya. Sementara itu, Narasumber 6, mengalami dampak negatif pemotongan isi konten yang sudah diunggahnya. Video yang dimiliki oleh organisasinya dipotong-potong di bagian yang terdengar kontroversial dan disebar kembali dengan pesan yang keliru.

Jika para narasumber mendapatkan dampak negatif medsos yang berasal dari pihak luar, Narasumber 2 justru mengalami serangan dari orang-orang yang pernah menjadi keluarganya. Setelah bercerai dan keluar dari perkawinan paksa, teror yang dialami oleh Narasumber 2 berasal dari keluarga mantan suaminya. Serangan yang terjadi tidak hanya secara personal namun juga terhadap medsos organisasinya sehingga ia perlu untuk menonaktifkan media sosialnya terlebih dahulu untuk menjauh dari serangan-serangan siber tersebut.

Cara yang dilakukan oleh para narasumber untuk mengatasi dampak negatif dari medsos merupakan bentuk reaksi wajar dalam menghadapi orang asing secara anonim. Dalam konteks ini, emosi yang mereka rasakan datang dari persinggungan mereka dengan objek tanggapan afektif dari orang lain tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa reaksi negatif tersebut akan memengaruhi kehidupan mereka. Namun, dengan menjadikan isu sosial dan politik yang mereka bawa sebagai objek mengalir, mereka tidak bertindak secara naif. Keterasingan yang datang dari serangan atas isu yang mereka bawa—baik atas isu maupun serangan personal—tetap dicurigai oleh mereka. Pada kondisi ini, mereka menyadari apa yang berbahaya untuk mereka sehingga dapat mereka hindari—sebelum memengaruhi mereka lebih jauh. Upaya ini merupakan bentuk keberhasilan mereka menyadari serialitas identitas yang menubuh sehingga dapat segera memberi reaksi yang tidak berakibat fatal pada kehidupan mereka.

Dukungan dalam Aktivisme sebagai Motivasi Keterlibatan Perempuan Muda dalam Ruang Politik

Hal terakhir yang kami sorot adalah kaitan dukungan sebagai modal utama membangun solidaritas. Untuk sampai pada rasa solidaritas kolektif, para narasumber menunjukkan kekuatan mereka sebagai subjek melalui motivasi melakukan perubahan (Young 1990). Mereka tidak berlindung di balik kelompok semata, melainkan berdiri sebagai subjek di tengah perlawanan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Semangat mereka inilah yang menjadi pijakan bagi gerakan dalam komunitas yang mereka bangun. Di dalam relasi inilah, muncul solidaritas.

Di balik kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para aktivis, berbagai dukungan telah membantu mereka untuk tidak menyerah dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka perjuangkan. Dukungan yang diterima oleh para narasumber didominasi oleh motivasi dari sesama aktivis di organisasi masing-masing. Hal tersebut dikarenakan 8 orang narasumber tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga masing-masing.

Beberapa narasumber menyatakan bahwa keluarga yang kurang dukungan memiliki alasan yang didasari oleh pemahaman feminisme yang minim. Beberapa orang tua narasumber terang-terangan menolak. Akan tetapi, ada beberapa yang tidak mendiamkan saja, tidak menunjukkan dukungan maupun penolakan. Adapun orang tua yang cukup mendukung, dua orang narasumber ada yang aktivismenya ditolak oleh saudara kandung maupun keluarga besar mereka. Faktor minim wawasan akan pergerakan perempuan masih mendominasi alasan penolakan tersebut. Utamanya kepercayaan bahwa perempuan seharusnya memiliki kodrat untuk tidak mendominasi laki-laki. Atau ada juga yang beralasan bahwa advokasi yang disuarakan di isu gender dan feminisme tidak penting aktivisme lain seperti mereka yang peduli bencana alam.

Berbeda dengan yang lainnya, Narasumber 1 mengalami dukungan penuh dari kedua orang tua dan juga saudara kandungnya. Kedua orang tua Narasumber 1 bahkan mengarahkan anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka untuk meminta

bantuannya dalam mendaftarkan mereka ke sekolah. Mereka rajin bercerita ke orang-orang yang mereka kenal mengenai aktivisme putri mereka di ruang politik dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Saudara kandung Narasumber 1 turut menunjukkan dukungannya dengan mencari tahu dan mengikuti beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh kakaknya.

Dari paparan para narasumber, masih terlihat bahwa lingkungan di sekitar mereka masih terbawa pola pikir patriarkal yang mengakar dalam masyarakat sehingga dukungan penuh untuk mereka dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka perjuangkan sangat minim. Setidaknya upaya mereka membangun jejaring dengan berbagai komunitas, individu sesama aktivis perempuan muda, telah menunjukkan upaya besar untuk menumbuhkan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab ini menjadi bagian dari kesamaan rasa dalam menghadirkan solidaritas (Young 1990). Minimnya dukungan dari orang terdekat terkadang dapat mematahkan semangat perjuangan para aktivis perempuan muda, termasuk narasumber kami dalam penelitian ini. Setidaknya upaya yang mereka lakukan untuk tataran memberikan pengaruh besar pada banyak perempuan muda lain telah menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi kita: bahwa upaya yang konsisten menghadapi ketidakadilan merupakan bagian dari kolektivitas pengalaman yang tidak dapat mengkhianati perjuangan mereka. Mereka tidak menyerah dengan kondisi minim dukungan keluarga, justru tekanan tersebut menjadi motivasi lanjutan bagi mereka untuk terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dalam isu sosial dan politik.

Belajar dari Serialitas Pengetahuan

Pengetahuan yang dibagikan dalam pemaparan para narasumber kemudian dapat kami tarik sebagai sebuah pembelajaran dari serialitas pengetahuan mereka. Kami melihat ada beberapa cerita yang penting untuk kita pahami, yakni dari afiliasi, motivasi, tawaran media baru, dan dukungan dalam aktivisme seperti yang terpapar di Tabel 1.

Tabel 1. Serialitas Pengetahuan Aktivist Perempuwan Muda

Narasumber (Afiliasi Aktivist)	Motivasi	Penggunaan Media Baru	Dukungan dalam Aktivist
Narasumber 1 (PLAN International/ State of Youth Sukabumi)	Berangkat dari isu perkawinan anak di lingkungannya (Sukabumi). Memulai kampanye anti perkawinan anak bersama State of Youth Sukabumi. Isu iklim dan kesetaraan gender juga menjadi isu yang menarik perhatiannya.	Penggunaan media baru, internet dan sosial media sebagai media advokasi. Membuat webinar untuk sosialisasi isu. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada persoalan keamanan digital yang mengancam aktivis muda.	Dukungan didapat dari rekan-rekan sesama aktivis State of Youth Sukabumi. Juga dari keluarga seperti yang dilakukan orang tuanya membantu memberikan solusi dan aksi dalam hambatan pendidikan untuk anak-anak tetangga, dan adiknya juga mengikuti kegiatan aktivisme yang sama.
Narasumber 2 (BeWithYou Bandung)	Aktivist dipicu oleh pengalaman pribadinya dinikahkan secara paksa sehingga ia menyuarakan isu-isu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang dialami oleh perempuan dan Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS).	BeWithYou Bandung banyak menggunakan media sosial untuk kampanye dan advokasi. Media baru banyak memberi manfaat untuk relasi dan dukungan. Namun, perlu dicatat bahwa lewat media sosial juga dapat terjadi teror secara personal sehingga Narasumber 2 membatasi penggunaannya.	Dukungan didapatkan dari BeWithYou Bandung dan BeWithYou Indonesia. Selain itu, sesama organisasi atau gerakan aktivisme lainnya turut menjadi sumber dukungan. Namun, keluarga tidak mendukung sepenuhnya, karena perbedaan nilai dan tradisi yang diyakini.
Narasumber 3 (Sexdugram: Yayasan Pendidikan Setara Merdeka)	Aktivist dimotivasi sejak anggota keluarganya yang mengalami <i>prolapse uteri</i> (terkait kesehatan reproduksi perempuan). Ada stigma pada isu-isu reproduksi sehingga ia merasa perlu menyuarakan pentingnya pendidikan seksual yang komprehensif.	Menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye pendidikan seks komprehensif serta isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) melalui akun Instagram @sexdugram. Namun, ada risiko yang mengikuti penggunaan media sosial. Sering kali Sexdugram menerima pesan-pesan yang melecehkan mereka secara seksual.	Dukungan penuh didapatkan dari lingkungan kampus termasuk dari dosen-dosen yang mendukung aktivismenya. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari <i>Plan Indonesia</i> . Namun, justru keluarga tidak memberikan dukungan penuh. Beberapa teman dekat juga justru menganggap remeh gerakan yang dibuatnya.
Narasumber 4 (Youth Coalition for Girls Jabodetabek)	Aktivist dimulai dari keanggotaannya di Forum Anak Kabupaten Bogor. Dari situ, ia melihat sendiri bahwa sering kali opini anak tidak didengar oleh orang dewasa. Ia juga mengangkat isu anak yang terkait lingkungan ramah anak hingga perkawinan anak.	Media sosial dan aplikasi digital digunakan untuk advokasi dan pemberdayaan aktivis perempuan. Instagram dan LinkedIn adalah media yang sering digunakan untuk mengangkat isu anti perkawinan anak dan isu feminisme lain.	Mendapatkan dukungan dari Youth Coalition for Girls dan Plan Indonesia beserta organisasi-organisasi serupa lainnya. Dukungan juga didapatkan dari orang tuanya. Hanya saja ia masih harus menghadapi kakak laki-lakinya yang terbawa stigma atas aktivisme feminis.
Narasumber 5 (BeWithYou Indonesia)	Pernah mengalami kekerasan seksual dan melihat pengalaman ibunya yang mengalami kawin paksa. Mendirikan BeWithYou yang dimulai dari edukasi, kampanye, dan advokasi isu <i>body positivity</i> . Aktivistnya mencapai ke gerakan akar rumput.	Media sosial digunakan BeWithYou untuk <i>raising awareness</i> dan eksposur terhadap isu serta aktivis perempuan. Tekanan dan stigma di sosial media sempat membuatnya hiatus. Namun kemudian, ia mengatasi dengan membedakan mana respons yang harus ditanggapi dan mana yang harus diacuhkan.	Narasumber 5 mendapatkan dukungan penuh dari organisasi terutama dari BeWithYou. Namun, ia tidak didukung oleh keluarganya.
Narasumber 6 (BeWithYou Sumatra)	Termotivasi oleh perkawinan anak yang terjadi di lingkungannya. Mengikuti <i>webinar</i> yang diselenggarakan oleh BeWithYou pada 2020 dan kemudian mengikuti aktivisme yang dilakukan oleh gerakan tersebut. Di kampus ia juga mengikuti sebuah organisasi, sebagai konselor untuk mahasiswa yang diintimidasi.	Media sosial digunakan untuk membantu aktivismenya dalam ajang promosi politik dan meningkatkan kesadaran terhadap BeWithYou Sumatra. Namun dampak negatifnya adalah risiko manipulasi dokumentasi digital oleh pihak-pihak tertentu sehingga mengaburkan informasi.	Dukungan yang didapatkannya mayoritas berasal dari BeWithYou Sumatra serta teman-teman kampus. Ia tidak mendapat dukungan penuh dari keluarga, bahkan ditentang kakaknya. Ada juga pihak dari kampus yang memintanya hati-hati dengan feminisme.

Narasumber (Afiliasi Aktivisme)	Motivasi	Penggunaan Media Baru	Dukungan dalam Aktivisme
Narasumber 7 (Youth Advisory Panel Plan Indonesia; BeWithYou Indonesia)	Berangkat dari tugas sekolah, ia melihat isu anak yang terjadi di dekatnya. Ia menggunakan privilesenya untuk mengadvokasi mereka yang membutuhkan. Bersama Narasumber 5, ia mendirikan BeWithYou.	Menggunakan media sosial untuk mengunggah ulang konten-konten edukatif milik Plan Indonesia dan konten-konten milik BeWithYou; termasuk advokasi terhadap kelompok disabilitas.	Banyak mendapat dukungan dari keluarga dari pihak ibu, serta dari komunitas dan organisasi tempatnya bernaung.
Narasumber 8 (BeWithYou Bandung)	Isu diskriminasi dan KS di sekolah membuatnya bergabung dengan BeWithYou Bandung.	Menggunakan media sosial untuk advokasi dan edukasi awal, terutama untuk gerakan penyadaran. media sosial juga membantu untuk mengenali persoalan baru seperti KBGS. Namun, tetap perlu ada aktivitas lanjutan (tidak hanya mengandalkan sosial media). mereka sendiri yang berlapis.	Mendapatkan dukungan dari teman-teman di BeWithYou dan juga pacarnya. Namun, ia tidak didukung oleh keluarganya, terutama karena menganggap isu yang diangkat kurang penting dan tidak bermanfaat (dibandingkan dengan kegiatan membantu korban bencana alam misalnya).
Narasumber 9 (Youth Coalitions for Girls Kupang)	Perkawinan sepupunya karena mengalami kehamilan tidak direncanakan (KTD), pernikahan dini, membuatnya terjun pada isu anti pernikahan anak. Tahun 2016, ia bergabung dengan Youth Coalition for Girls di Kupang.	Media sosial digunakan untuk kampanye mengenai KS dan KBGS secara <i>online</i> . Ia percaya bahwa media sosial dapat menjadi wadah pemberdayaan perempuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa masih banyak diskriminasi dan komentar seksis yang muncul sebagai reaksi kampanye di media sosial.	Mendapatkan dukungan dari komunitas dan juga keluarga. Aktivitas ibunya di LSM yang fokus pada isu pendidikan anak usia dini dan hak anak turut menjadi dukungan semangat aktivismenya.
Narasumber 10 (Ceria Indonesia)	Menyaksikan sang ibu tidak berhasil menjadi kepala desa karena diskriminasi yang dialaminya sebagai perempuan. Ini juga yang memotivasinya untuk masuk partai dan mencalonkan diri menjadi perwakilan legislatif. Pengalamannya ketika menjadi korban KS dan melihat banyak kasus KDRT membuatnya lebih vokal dalam mengangkat isu.	Media sosial digunakan sebagai tempat sosialisasi pelatihan yang diselenggarakan untuk khalayak umum. Namun, penggunaan media baru juga memiliki risiko salah satunya komentar negatif terhadap konten mengenai keluarga berencana (KB).	Dukungan yang diterima didapatkan dari Plan Indonesia untuk program pemberdayaan perempuan. Dukungan kedua didapatkan penuh dari orang tuanya. Ia kemudian juga merasakan dukungan dari kampus yang diajak berkolaborasi dan juga pemerintah. Tantangannya datang dari wilayah baru yang meragukan dirinya. Tetapi Narasumber 10 tidak menyerah dengan situasi ini.

Sumber: Dikelola dari *Focus Group Discussion*

Paparan dari Tabel 1 merupakan rangkaian pengetahuan yang perlu kita ketahui untuk memahami apa semangat perjuangan tiap aktivis perempuan muda. Motivasi yang mereka lakukan tidak datang hanya karena satu kejadian, melainkan ada rangkaian yang mendorong satu kejadian sebagai pemicu. Kita belajar dari mereka untuk menumbuhkan empati terhadap serangkaian ketidakadilan yang dialami tiap perempuan. Kesadaran atas adanya ketidakadilan inilah yang dapat menjadi pemicu utama kita tergerak melakukan perubahan—baik dimulai dari diri sendiri maupun untuk menggerakkan komunitas dan orang lain. Ragam solusi yang dilakukan oleh masing-masing narasumber

merupakan bentuk penghargaan atas perbedaan situasi—sebagai serialitas identitas. Pengalaman dan pengetahuan para narasumber menjadi salah satu cara kita melibatkan langsung perempuan di ruang politik. Tanpa representasi perempuan, kita telah meniadakan variabel keberagaman pengalaman di ruang politik. Apa yang dilakukan oleh para narasumber menunjukkan bagaimana keterlibatan mereka secara langsung dapat mengubah perspektif lingkungan sekitar mereka dalam memandang satu isu dan hambatan yang dialami—tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan berbagai isu lain.

Tindakan afektif yang dilakukan oleh para narasumber dalam aktivisme digital mereka berhasil menumbuhkan perasaan yang seakan-akan 'sama' dirasakan oleh para pengikut platform digital yang mereka gunakan. Keberhasilan ini memengaruhi ruang politik mereka secara kontekstual (Ahmed 2004). Ada kesepakatan baru yang kita pahami sebagai persepsi bersama, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dibagikan. Tindakan ini memunculkan semangat solidaritas yang terlihat dari dukungan kepada mereka—termasuk penguatan untuk mereka menghadapi hambatan dalam aktivisme. Inilah bukti bahwa isu representasi perempuan muda di ruang politik penting untuk diperhatikan. Upaya menumbuhkan tanggung jawab sosial atas isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan bukan hanya tanggung jawab satu orang. Ada kolektivitas pengalaman ketertindasan yang harus kita kenali. Satu-satunya cara adalah menekankan pentingnya keterlibatan orang pertama sebagai subjek. Dalam hal ini, tentunya dorongan melibatkan perempuan muda dalam ruang politik adalah cara kita menumbuhkan tanggung jawab tersebut—demi solidaritas bersama.

Penutup

Proses yang kami lakukan selama penelitian, terutama selama proses FGD, membuka banyak hal baru tentang aktivisme perempuan muda di ruang politik. Kami belajar dari pengalaman para narasumber terutama bagaimana mereka memperhatikan isu, proses keterlibatan, hambatan, metode advokasi yang mereka bangun, hingga hasil yang mereka capai. Seluruh data yang kami paparkan menjadi pembelajaran juga bagi kami untuk memahami pentingnya isu partisipasi dan representasi perempuan di ruang politik sejak dini.

Kita pahami bahwa isu partisipasi dan representasi perempuan di ruang publik bukan sekadar alat untuk memenuhi tujuan isu lain. Jika kita menjadikan "partisipasi perempuan" sebagai alat pemenuhan tujuan isu lain, maka kita hanya akan berhenti pada persoalan "pemenuhan kuota" dan melihat perempuan sekadar kelompok. Penceritaan pengalaman para narasumber menunjukkan bahwa perempuan tidak dapat kita lihat sebagai satu kelompok, melainkan sebuah serialitas pengalaman. Penguatan atas pemahaman ini dapat membuka ruang keberagaman isu dengan berbagai pendekatan secara interseksional. Persoalan partisipasi dan representasi perempuan harus dapat dilihat sebagai koridor persoalan tersendiri yang nantinya akan berinterseksi dengan isu-isu lainnya.

Pengalaman dan pengetahuan para aktivis perempuan muda memperkuat pemahaman kita akan serialitas sejarah gerakan perempuan di ruang politik. Kita tidak hanya melihat isu yang diangkat secara eksklusif atas nama gerakan, melainkan juga sebagai persoalan bersama di masyarakat. Pengaruh besar yang dilakukan oleh para aktivis perempuan muda ini menunjukkan kemampuan mereka menerjemahkan keasingan isu perempuan di masyarakat dengan kreatif. Para perempuan muda tidak lagi dapat disepelkan oleh masyarakat—terutama jika masih melakukan pembedaan kualitas berdasarkan usia. Justru kita belajar dari semangat yang mereka hadirkan dalam tiap advokasi sosial dan politiknya.

Hanya saja ada satu hal yang perlu kita ingat: dukungan diperlukan agar mereka tidak bergerak sendiri. Persoalan solidaritas ini juga kita perlukan dalam berbagai isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan di masyarakat. Kita perlu memahami penceritaan sarat diskriminasi yang dialami oleh para narasumber. Dukungan sebagai bentuk solidaritas adalah wujud nyata dari tanggung jawab sosial yang harus kita mulai dari diri sendiri agar dapat menjadi pengaruh besar bagi lingkungan sekitar kita. Harapan kami dari penelitian ini, timbul jejaring penuh semangat solidaritas kepada para aktivis perempuan muda agar mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dalam perjuangan mencapai keadilan dan kesetaraan di ruang politis.

Daftar Pustaka

- Åhäll, Linda. 2018. "Affect as Methodology: Feminism and the Politics of Emotion", dalam *International Political Sociology*, Vol. 12, Issue 1, hlm. 36—52, diakses pada Juli 2023, di <https://doi.org/10.1093/ips/olx024>.
- Ahmed, Sara. 2004. *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh University Press: Edinburgh.
- Fitsum, A. 2017. "The Role of Affirmative Action on Empowering Women's, in the Case of L/HaHale", *Journal of Civil & Legal Sciences*, hlm. 1—7. doi:10.4172/2169-0170.1000226.
- Fraser, Nancy. 1990. "Rethinking the Public Sphere: A Contribution to the Critique of Actually Existing Democracy", *Social Text*, 25/26, hlm. 56—80.
- Fuentes, M. A. 2023. "Digital Activism", *Encyclopedia Britannica*, diakses pada Juli 2023, di <https://www.britannica.com/topic/digital-activism>.
- Given, Lisa M. 2008. *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Sage: Thousand Oaks, CA.
- Izzati, F. F. 2019. "Problem "Kerja Perempuan" dan Ide Mengenai Demokratisasi Kerja untuk Pemberdayaan Perempuan yang Membebaskan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 141—150.

- Kuljiš, Marita B. 2017. "Civil Society, Public Sphere, and Justice in the Philosophy of Iris Marion Young", *Synthesis Philosophica*, diakses pada Juli 2023, di https://www.researchgate.net/publication/321905802_Civil_Society_Public_Sphere_and_Justice_in_the_Philosophy_of_Iris_Marion_Young.
- Margret, A. 2019. "Dua Dekade Demokrasi Indonesia dan Meredupnya Agenda Feminis", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 89—100.
- Mindzie, M. A. 2015. *Enhancing the Political Participation of Women and Youth*, International Peace Institute, diakses pada Juli 2023, di <https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2015/02/IPI-Rpt-Building-Peace.pdf>.
- Mulyono, Ignatius. 2010. "Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan", dalam Diskusi Panel RUU Pemilu – Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, diakses pada Juli 2023, di https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/makalah_STRATEGI_MENINGKATKAN_KETERWAKILAN_PEREMPUAN__Oleh-Ignatius_Mulyono.pdf.
- Plan International. 2022. *Equal Power Now, Girls, Young Women & Political Participation*. Plan International: UK.
- Pratiwi, A. M. 2019. "Kebijakan, Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik: Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 2014–2019", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24 No. 2, hlm. 151—163.
- Salsabila, N. & Diera, G. A. 2022. "Advokasi Media Sosial Yayasan Jurnal Perempuan: Upaya Penyebaran Wacana Feminis di Era Digital", *Jurnal Perempuan*, Vol. 27 No. 2, hlm. 129—141, diakses pada Juli 2023, di <http://www.indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/701/471>.
- VOA Indonesia. 2019. "Kiprah Perempuan", diakses pada Juli 2023, di <https://www.voaindonesia.com/a/media-media-seksis-rugikan-politisi-perempuan/5214867.html>.
- Young, I. M. 1990. *Justice and the Politics of Difference*, Princeton University Press: Princeton.
- Young, I. M. 1994. "Gender as Seriality: Thinking about Women as a Social Collective", *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, Vol. 19(3), hlm. 713—738.
- Young, I. M. 2000. *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press: Oxford.